PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KRIMINALITAS TERHADAP INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

FRISKA OFTIANA LEBERTA
NIM. B1011211013

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Friska Oftiana Leberta
Nim	: B1011211013
Jurusan	:Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kriminalitas Terhadap Indeks Kebahagiaan di indonesia

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber Pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan keliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya penulis yang berakibat pada pembataian Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 1 Mei 2026

Friska Oftiana Leberta
Nim. B1011211013

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Friska Oftiana Leberta
Nim	: B1011211013
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Tanggal Ujian	: 25 Februari 2026
Judul Tugas Akhir	:Pengaruh Upah Minimun Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kriminalitas Terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir (TA) ini Adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang kutip maupun yang telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 1 Mei 2026

Friska Oftiana Leberta
Nim. B1011211013

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kriminalitas Terhadap Indeks Kebahagiaan Di Indonesia

Penanggung Jawab Yuridis

Friska Oftiana Leberta
B1011211013

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 25 Februari 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Prof. Dr. Jamaliah, S.E., M.Si. NIP 196203091987032007	29/5/2026	
2.	Ketua Penguji	Dr. Restiatun, S.E., M.Si. NIP 197505212002122001	29/5/2026	
3.	Anggota Penguji	Fara Dina, S.E., M.E. NIP 198607302019032010	2/4/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 06 MAY 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya panjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir saya yang berjudul " Pengaruh Upah Minimun Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kriminalitas Terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia " ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana di Falkutas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Universitas Tanjungpura Pontianak. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1 Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

2 Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

3 Bapak Yanto,,SE.,M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

4 Ibu Prof., Dr., Hj., Jamaliah., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah sabar dan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang tak pernah lelah sejak awal hingga akhir penyusunan Tugas Akhir ini.

5 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman akademis yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6 Dosen penguji Tugas Akhir saya Ibu Dr., Restiatun., S.E., M.Si. dan ibu Fara Dina, S.E., M.E. yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama proses perjalanan Tugas Akhir saya.

7 Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak dan mamak saya tercinta Yulianus Rudi Hartono dan Ibu Yuliana Sunarni, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral, materi, serta doa yang tulus. Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk kalian.

8 Kakak saya Yesiana Irenaita yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penyusunan tugas akhir ini.

9 Kepada teman-teman seperjuangan Wita, Lavena, Rinda Dan Vilda yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta memberikan semangat selama perjalanan ini.

10 Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

11 Kepada sepupu saya yang telah memberi inspirasi dan support dalam pembuatan

Tugas Akhir saya, dan yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta memberikan semangat selama perjalanan ini.

Pontianak, 1 Juni 2026

Friska Oftiana Leberta
Nim. B1011211013

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KRIMINALITAS TERHADAP INDEKS KEBAHAGIAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Kriminalitas terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel dari 34 provinsi pada tahun 2014,2017, dan 2021 dengan metode analisis regresi data panel dan pemilihan model terbaik berdasarkan *Fixed Effect Model* (FEM) melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan yang pentingnya peningkatan pendapatan minimum bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia tidak selalu meningkatkan kebahagiaan subjektif. Variabel kriminalitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan sehingga tidak memberikan dampak langsung yang kuat terhadap kebahagiaan. Secara simultan, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai R^2 sebesar 0,7689, menandakan bahwa sebagian besar variasi Indeks Kebahagiaan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan ekonomi, pembangunan manusia, dan stabilitas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: *Indeks Kebahagiaan, UMP, IPM, Kriminalitas*

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KRIMINALITAS TERHADAP INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA

OLEH : FRISKA OFTIANA LEBERTA

RINGKASAN

1. Latar belakang

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik material maupun non-material. Selama ini, keberhasilan pembangunan sering diukur melalui indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun indikator tersebut belum mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara utuh karena lebih berfokus pada pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkenalkan Indeks Kebahagiaan sebagai indikator kesejahteraan subjektif yang mencakup dimensi kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Berdasarkan World Happiness Report 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-84 dari 137 negara, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama terkait kepercayaan sosial dan kualitas institusi publik. Tingkat kebahagiaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi, seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kriminalitas. UMP yang meningkat dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehingga meningkatkan kepuasan hidup, sedangkan IPM mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang berkontribusi terhadap kesejahteraan. Di sisi lain, tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menurunkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap kebahagiaan. Data BPS menunjukkan adanya perbedaan tingkat kebahagiaan antarprovinsi di Indonesia yang tidak selalu sejalan dengan tingginya UMP atau IPM. Beberapa provinsi di wilayah timur seperti Maluku Utara dan Kalimantan Utara memiliki indeks kebahagiaan lebih tinggi meskipun tingkat pendapatan dan IPM relatif lebih rendah dibandingkan provinsi maju seperti DKI Jakarta. Selain itu, provinsi dengan tingkat kriminalitas rendah cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi dengan tingkat kriminalitas tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan masyarakat dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kualitas pembangunan manusia, serta kondisi sosial dan keamanan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh UMP, IPM, dan tingkat kriminalitas terhadap Indeks Kebahagiaan menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik.

2. Permasalahan

Kebahagiaan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kriminalitas, di mana peningkatan UMP dan IPM belum tentu secara langsung meningkatkan kebahagiaan karena adanya ketimpangan biaya hidup dan pembangunan antarwilayah, sementara tingginya kriminalitas dapat menurunkan rasa aman yang berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia.

3. Tujuan penelitian

1 Untuk mengulji dan menganalisis pengarulh Upah Minimum Provinsi terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia.

2 Untuk mengulji dan menganalisis pengarulh Indeks Pembangulnan Manulsia terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia.

3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kriminalitas terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia.

4. Metode penelitian

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kulantitatif sebagai pendekatan ulntulk menganalisis data, yaitul sulatul pendekatan yang bertuljulan ulntulk menilai sejaulh mana pengarulh sulatul variabel terhadap variabel lainnya. Tuljulan dilakulkannya penelitian deskriptif kulantitatif adalah ulntulk menyajikan dan menganalisis bagaimana pengarulh pertulmbulhan ekonomi, indeks pembangulnan manulsia dan tingkat pendidikan terhadap indeks kebahagiaan di provinsi Indonesia tahuln 2014, 2017, dan 2021. Metode analisis menggulnakan metode regresi data panel. Data panel adalah gabulngan antara data time series dengan cross section. Alat pengolahan dalam penelitian ini yaitul dengan menggulnakan Eviews 12.

5. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan karena peningkatan pendapatan mampu meningkatkan kesejahteraan subjektif masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman ekonomi, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan emosional dan sosial masyarakat, sementara kriminalitas berpengaruh positif namun tidak signifikan yang mengindikasikan bahwa tingkat kejahatan bukan faktor utama penentu kebahagiaan masyarakat di Indonesia karena pengaruhnya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, adaptasi sosial, serta faktor lain seperti pendapatan dan kohesi sosial.

6. Kesimpulan dan rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan karena peningkatan pendapatan mampu meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman ekonomi masyarakat, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif akibat adanya tekanan sosial dan tingginya ekspektasi hidup yang tidak selalu meningkatkan kepuasan masyarakat,

sementara kriminalitas menunjukkan pengaruh positif yang mengindikasikan bahwa tingkat kejahatan belum menjadi faktor utama penentu kebahagiaan masyarakat di Indonesia meskipun rasa aman tetap penting dalam mendukung kualitas hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah disarankan menjaga konsistensi kebijakan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP), meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berorientasi pada kesejahteraan non-material dan pemerataan layanan publik, serta tetap menjaga keamanan sosial, sementara masyarakat diharapkan mampu mengelola pendapatan dengan baik, menerapkan gaya hidup sehat, mengelola stres, dan memperkuat hubungan sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI i
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
1. PENDAHULUAN 1
2. KAJIAN LITERATUR 4
3 METODE PENELITIAN 8
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 11
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 15
DAFTAR RUJUKAN 16
LAMPIRAN 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Kebahagiaan, Upah Minimum Provinsi, IPM, Dan Tingkat Kriminalitas Menurut Provinsi Tahun 2021 2
Tabel 2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 9
Tabel 3 Rekapitulasi Uji Model 11
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas 11
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas 12
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 12
Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual 7

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KRIMINALITAS TERHADAP INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA

[1]Friska Oftiana Leberta

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Kriminalitas terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel dari 34 provinsi pada tahun 2014,2017, dan 2021 dengan metode analisis regresi data panel dan pemilihan model terbaik berdasarkan *Fixed Effect Model* (FEM) melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan yang pentingnya peningkatan pendapatan minimum bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia tidak selalu meningkatkan kebahagiaan subjektif. Variabel kriminalitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan sehingga tidak memberikan dampak langsung yang kuat terhadap kebahagiaan. Secara simultan, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai R^2 sebesar 0,7689, menandakan bahwa sebagian besar variasi Indeks Kebahagiaan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan ekonomi, pembangunan manusia, dan stabilitas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: *Indeks Kebahagiaan, UMP, IPM, Kriminalitas*

ABSTRAK

This study aims to analyze the influence of Provincial Minimum Wage (UMP), Human Development Index (HDI), and Crime on the Happiness Index in Indonesia. The research utilizes panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) selected as the best model based on the Chow Test and Hausman Test. The result indicate that the Provincial Minimum Wage has a positive and significant effect on the Happiness Index, highlighting the importance of increasing minimum income to enchance societal well-being. Meanwhile, the Human Development Index shows a negative and insignificant effect, suggesting that improvements in human development do not necessarily increase subjective happiness. The crime variable exhibits a positive but insignificant effect, indicating that it does not exert a strong direct impact on happiness. Simultaneously, all three variables significantly influence the Happiness Index with an R2 value of 0,7689 Indicating that a substantial portion of the variation in the Happiness Index can be explained by these variables. These findings highlight the importance of economics policy, human development, and social stability in improving societal well-being.

Kata Kunci: Happiness Index, UMP. HDI, Crime

[1]b1011211013@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia baik secara material maupun non-material. Selama ini, indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan sebagai ukuran utama dalam menilai keberhasilan pembangunan. Namun, indikator ekonomi tersebut belum mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan dan akumulasi pendapatan. Kesejahteraan sejati merupakan kondisi yang bersifat multidimensional yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas lingkungan serta kepuasan hidup masyarakat (Yun & Mao, 2025).

Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan yang lebih inklusif, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2014 memperkenalkan Indeks Kebahagiaan sebagai indikator kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia. Indeks ini diukur melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. Berbeda dengan indikator ekonomi, Indeks Kebahagiaan mengukur persepsi individu mengenai kehidupannya secara menyeluruh. Badan Pusat Statistik (2021) merumuskan bahwa Indeks Kebahagiaaan mencakup tiga dimensi utama: (1) Kepuasan Hidup (life evaluation) yang menilai kualitas hidup secara umum, (2) Perasaan (affect) yang mencakup pengalaman emosi positif dan negatif, serta (3) Makna Hidup (eudaimonia) yaitu sejauh mana individu merasa hidupnya memiliki tujuan dan makna. Dengan dimensi tersebut, Indeks Kebahagiaan dapat memberikan gambaran lebih utuh tentang kesejahteraan manusia.

Menulrult World Happines Report (2023) yang diterbitkan oleh Sulstainable Development Solultions Network (SDSN) di bawah naulngan perserikatan Bangsa-Bangsa, tingkat kebahagiaan sulatul negara diulkulr berdasarkan beberapa indikator ultama, seperti pendapatan per kapita, dulkulngan sosial, harapan hidulp sehat, kebebasan menentulkan pilihan hidulp, kemulrahan hati, dan persepsi terhadap tingkat korulpsi. Dalam laporan tersebult, Indonesia menempati peringkat ke-84 dari 137 negara, menulnjulkkan bahwa meskipuln ada peningkatan di beberapa aspek kesejahteraan, tantangan dalam hal kepercayaan sosial dan persepsi terhadap institulsi pulblik masih menjadi pekerjaan rulmah besar dalam ulpaya meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara menyelulrulh (Helliwell et.al, 2023).

Kajian mengenai kebahagiaan masyarakat memiliki relevansi strategis terhadap arah pembangunan nasional yang menekankan kesejahteraan manusia seutuhnya sebagaimana tercantum dalam RPJPN Indonesia 2025-2045. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-3 (Kehidupan sehat dan Sejahtera), tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Pendekatan kebahagiaan menjadi penting sebagai indikator komplementer untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional secara holistik.

Indeks Kebahagiaan dinilai sebagai ulkulran alternatif karena dapat mengulkulr aspek yang berdampak langsulng pada kesejahteraan manulsia (Sinha et al., 2023). Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dalam hal pertulmbulhan ekonomi, indeks pembangulanan manulsia, dan tingkat pendidikan, sehingga menghasilkan variasi dalam Indeks Kebahagiaan. Berdasarkan data tahuln 2014,2017 dan 2021, terdapat perbedaan mencolok antar provinsi dalam ketiga indikator tersebult. Oleh karena itul, analisis lebih mendalam diperlulkan ulntulk memahami sejaulh mana pengarulh upah minimum provinsi, indeks pembangulan manulsia, dan tingkat kriminalitas terhadap Indeks Kebahagiaan.

Berdasarkan teori subjective well-being yang dikemukakan oleh Almeida & Alema (2025), kebahagiaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Salah satu faktor ekonomi adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mencerminkan tingkat kesejahteraan material masyarakat. Peningkatan UMP dapat meningkatkan pendapatan pekerja

sehingga membantu individu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan hidup dan kebahagiaan.

Selain itu, kualitas pembangunan manusia juga berperan dalam menentukan tingkat kebahagiaan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian pembangunan melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada ketiga dimensi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, faktor non-ekonomi seperti tingkat kriminalitas juga memengaruhi kebahagiaan masyarakat. Tingkat kriminalitas berkaitan dengan rasa aman dan stabilitas sosial. Lingkungan yang aman dapat menciptakan interaksi sosial yang harmonis dan meningkatkan rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendukung tercapainya kebahagiaan masyarakat.

Tabel 1 Indeks Kebahagiaan, Upah Minimum Provinsi, IPM, Dan Tingkat Kriminalitas Menurut Provinsi Tahun 2021

No	Provinsi	Tahun 2021			
		Indeks Kebahagiaan	Upah Minimum	IPM	Tingkat kriminalitas
		(Indeks)	(Rupiah)	(Indeks)	(Kasus)
1	Aceh	71,24	3,165,031	73,48	6.651
2	Sumatera Utara	70,57	2,499,423	73,84	36.534
3	Sumatera Barat	71,34	2,484,041	74,56	5.666
4	Riau	71,80	2,888,564	73,89	7.512
5	Jambi	75,15	2,630,162	72,62	3.701
6	Sumatera Selatan	72,37	3,144,446	71,83	13.037
7	Bengkulu	69,74	2,215,000	73,16	3.493
8	Lampung	71,64	2,432,002	71,25	9.764
9	Kep. Bangka Belitung	73,25	3,230,024	72,96	1.566
10	Kepulauan Riau	74,78	3,005,460	77,87	2.481
11	DKI Jakarta	70,68	4,416,187	82,25	29.103
12	Jawa Barat	70,23	1,810,351	72,96	7.502
13	Jawa Tengah	71,73	1,798,979	72,17	8.909
14	DI Yogyakarta	71,70	1,765,000	80,22	4.774
15	Jawa Timur	72,08	1,868,777	73,48	19.257
16	Banten	68,08	2,460,997	74,68	3.434
17	Bali	71,44	2,494,000	76,69	2.404
18	Nusa Tenggara Barat	69,98	2,183,883	70,86	6.296
19	Nusa Tenggara Timur	70,31	1,950,000	67,02	4.909
20	Kalimantan Barat	72,49	2,399,699	68,99	4.048
21	Kalimantan Tengah	73,13	2,903,145	72,81	2.399
22	Kalimantan Selatan	73,48	2,877,449	73,45	4.973
23	Kalimantan Timur	73,49	2,981,379	76,60	4.564

24	Kalimantan Utara	76,33	3,000,804	71,57	971
25	Sulawesi Utara	74,96	3,310,723	74,03	6.215
26	Sulawesi Tengah	74,46	2,303,711	70,54	5.139
27	Sulawesi Selatan	73,07	3,165,876	73,38	14.636
28	Sulawesi Tenggara	73,98	2,552,015	71,82	2.431
29	Gorontalo	74,77	2,788,826	69,82	2.445
30	Sulawesi Barat	73,46	2,678,863	71,82	1.500
31	Maluku	76,28	2,604,961	71,55	3.139
32	Maluku Utara	76,34	2,721,530	69,56	1.008
33	Papua Barat	74,52	3,134,600	66,11	2.784
34	Papua	69,87	3,516,700	61,40	6.236

Sumber: *Badan Pusat Statistik* (2021)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) provinsi dengan tingkat kebahagiaan tertinggi adalah Maluku Utara (76,34%), disusul oleh Kalimantan Utara (76,33%), dan Maluku (76,28%). Sebaliknya, provinsi dengan tingkat kebahagiaan terendah adalah Banten (68,08%) dan Bengkulu (69,74%). Perbedaan ini menarik untuk dianalisis karena tidak sejalan dengan tingkat pendapatan atau Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia sebesar Rp4.416.187 tetapi indeks kebahagiannya hanya mencapai 70,68% masih di bawah beberapa provinsi di wilayah timur yang UMP-nya jauh lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebahagiaan masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi melainkan juga faktor sosial, lingkungan, dan keamanan.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki peran penting dalam membentuk kebahagiaan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi seperti DKI Jakarta (82,25%) dan DI Yogyakarta (80,22%) menunjukkan adanya kualitas hidup yang relatif baik, namun belum tentu berbanding lurus dengan kebahagiaan subjektif masyarakatnya. Sementara itu, provinsi seperti Maluku Utara dan Kalimantan Utara yang memiliki IPM lebih rendah justru mencatat indeks kebahagiaan lebih tinggi, menandakan adanya faktor non-ekonomi yang berkontribusi terhadap kebahagiaan

Faktor keamanan sosial memiliki kaitan erat dengan kebahagiaan masyarakat. Rasa aman dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup individu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) provinsi dengan tingkat kriminalitas tinggi seperti Sumatera Utara (36.534 kasus) dan Jawa Timur (19.257 kasus). Sedangkan, provinsi dengan tingkat kriminalitas rendah seperti Kalimantan Utara (971 kasus) dan Sulawesi Barat (1.500 kasus) justru menunjukkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rasa aman dan ketertiban sosial merupakan determinan penting dari kebahagiaan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Kriminalitas terhadap Indeks Kebahagiaan. Penelitian Susanto (2026) dan Kumar et al. (2024) menemukan bahwa peningkatan IPM berpengaruh positif terhadap kebahagiaan masyarakat yang mencerminkan pentingnya kualitas pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif. Sementara itu, Nurcahyo & Rosyadah (2023) menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan UMP memiliki hubungan positif dengan peningkatan Indeks Kebahagiaan di beberapa provinsi meskipun efeknya tidak merata karena perbedaan biaya hidup dan produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, Kudebayeva et al. (2025) menemukan bahwa tingkat kriminalitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kebahagiaan karena menurunkan rasa aman, kepercayaan sosial, dan stabilitas psikologis masyarakat.

Berdasarkan sisi ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penghasilan layak bagi pekerja. Berdasarkan data BPS (2024), nilai UMP di Indonesia terus meningkat sejak 2014 hingga 2024, menunjukkan upaya pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, kenaikan UMP tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan karena di beberapa provinsi, kenaikan upah justru diikuti dengan tingginya biaya hidup dan ketimpangan pendapatan.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, ketimpangan antarprovinsi masih cukup besar. Provinsi dengan IPM tinggi seperti DKI Jakarta cenderung memiliki masyarakat yang lebih sejahtera sedangkan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia rendah seperti Papua menunjukkan tingkat kebahagiaan yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang belum merata berpotensi memengaruhi kebahagiaan masyarakat.

Berdasarkan sisi sosial, tingkat kriminalitas juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kebahagiaan. Tingginya angka kejahatan menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan berkurangnya rasa aman di masyarakat. Data BPS (2021) menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat kriminalitas tinggi seperti DKI Jakarta dan Sumatera Utara cenderung memiliki skor kebahagiaan yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa rasa aman memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan subjektif masyarakat